

PENDIDIKAN PROFESI GURU AGAMA HINDU DALAM PENGUATAN KOMPETENSI DAN MODERASI BERAGAMA

Ni Luh Putu Nilawati

Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar

E-mail: nilawati@gmail.com

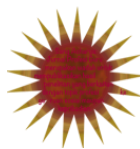
Abstrak

Guru agama Hindu memikul tanggung jawab ganda, yaitu sebagai pendidik profesional yang dituntut menguasai kompetensi keguruan dan sebagai penuntun rohani yang menjadi rujukan sikap keberagamaan peserta didik. Pendidikan Profesi Guru merupakan jalur resmi pembentukan keprofesian tersebut, namun penyelenggaraannya selama ini lebih menekankan penguasaan perangkat pembelajaran dan belum secara sengaja menjadikan moderasi beragama sebagai capaian pembelajaran yang terukur. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan hakikat dan landasan Pendidikan Profesi Guru Agama Hindu, menganalisis struktur kompetensi yang perlu dikuasainya, menelaah kedudukan moderasi beragama sebagai orientasi program, merumuskan strategi penguatannya, serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan. Data dianalisis dengan teknik analisis isi melalui tahapan reduksi, penyajian, dan penarikan simpulan. Hasil kajian menunjukkan tiga hal. Pertama, guru agama Hindu memerlukan struktur kompetensi yang terdiri atas empat kompetensi baku, yaitu pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional, yang dilengkapi kompetensi spiritual-keagamaan sebagai penciri keprofesiannya. Kedua, moderasi beragama memiliki akar yang kuat dalam ajaran Hindu, sehingga penguatannya melalui Pendidikan Profesi Guru bukan penambahan gagasan dari luar melainkan penggalian dari dalam. Ketiga, penguatan tersebut dapat ditempuh melalui pendalaman materi berbasis kasus, lokakarya perangkat pembelajaran bermuatan moderasi, praktik pengalaman lapangan di sekolah majemuk, serta penilaian sikap yang terencana.

Kata kunci: pendidikan profesi guru, guru agama Hindu, kompetensi guru, moderasi beragama

Abstract

Hindu religious education teachers bear a twofold responsibility, namely as professional educators required to master pedagogical competence and as spiritual guides who become the reference point for student religious attitudes. Teacher Professional Education is the formal pathway for shaping this professionalism, yet its implementation has thus far emphasised mastery of learning tools and has not deliberately positioned religious moderation as a measurable learning outcome. This study aims to describe the nature and legal basis of Teacher Professional Education for Hindu religious teachers, to analyse the competence structure they must master, to examine the position of religious moderation as the programme orientation, to formulate strategies for its strengthening, and to identify the challenges faced. The study employs a qualitative approach using library research. The data were analysed through content analysis consisting of reduction, display, and conclusion drawing. The findings reveal three points. First, Hindu religious education teachers require a competence structure



comprising four standard competences, namely pedagogical, personal, social, and professional, complemented by spiritual-religious competence as the distinguishing mark of their profession. Second, religious moderation has strong roots within Hindu teachings, so strengthening it through Teacher Professional Education is not the addition of an external idea but an excavation from within. Third, such strengthening can be pursued through case-based content deepening, workshops producing learning tools infused with moderation, field practice in plural schools, and planned attitude assessment.

Keywords: *teacher professional education, Hindu religious teacher, teacher competence, religious moderation*

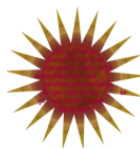
I. PENDAHULUAN

Mutu pendidikan pada akhirnya ditentukan oleh mutu gurunya. Kurikulum dapat disempurnakan, sarana dapat dilengkapi, dan anggaran dapat ditambah, tetapi semua itu hanya bermakna apabila ada guru yang mampu mengubahnya menjadi pengalaman belajar yang bermutu bagi peserta didik. Kesadaran inilah yang mendasari penempatan guru sebagai jabatan profesional melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yang menuntut guru memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikat pendidik. Pendidikan Profesi Guru kemudian dirancang sebagai jalur resmi untuk memenuhi tuntutan tersebut, baik melalui jalur prajabatan bagi calon guru maupun jalur dalam jabatan bagi guru yang telah mengajar.

Sejumlah kajian memperlihatkan bahwa program ini memang memberikan sumbangan nyata. Mardhatillah dan Surjanti (2023) menemukan bahwa Pendidikan Profesi Guru berkontribusi pada peningkatan kompetensi pedagogik dan profesionalitas guru di Indonesia, terutama karena programnya memadukan pendalaman materi dengan latihan menyusun dan melaksanakan perangkat pembelajaran. Maulana, Rahma, Mahfirah, Alfarizi, dan Darlis (2023) menegaskan bahwa program ini merupakan salah satu upaya utama pemerintah dalam meningkatkan profesionalitas guru karena menyiapkan guru tidak hanya menguasai bidang studi, melainkan juga menguasai cara membelajarkannya. Riyana, Hiskya, Suradji, dan Hanifah (2024) memperlihatkan dari sisi sekolah mitra bahwa kehadiran mahasiswa praktik program ini memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah penerima.

Meskipun demikian, terdapat persoalan yang belum banyak disentuh, khususnya menyangkut guru agama. Guru agama Hindu memikul tanggung jawab yang berbeda dari guru mata pelajaran umum. Ia tidak hanya dituntut menyampaikan pengetahuan tentang agama, melainkan juga menjadi teladan penghayatan ajaran, menjadi rujukan sikap keberagamaan peserta didik, dan menjadi penghubung antara sekolah, keluarga, dan komunitas umat. Sudarsana dan Mastini (2025) menegaskan bahwa pendidikan agama Hindu berperan penting dalam menanamkan nilai karakter pada generasi muda di era digital, dan peran tersebut menuntut guru yang tidak hanya menguasai materi melainkan juga mampu menghadirkan nilai secara meyakinkan di tengah derasnya pengaruh media.

Tanggung jawab tersebut menjadi semakin berat ketika dikaitkan dengan kenyataan kemajemukan Indonesia. Gejala intoleransi yang muncul di ruang publik maupun di lingkungan pendidikan menempatkan guru agama pada posisi yang menentukan. Zulkarnain dan Gule (2025) menyatakan bahwa kerukunan di tengah gejala intoleransi memerlukan landasan



pandangan yang mengakui adanya kebenaran yang sama di balik keragaman bentuk lahiriah agama, dan pandangan semacam itu perlu ditanamkan melalui pendidikan secara berkelanjutan. Karena pendidikan agama merupakan pintu masuk pembentukan cara pandang keberagamaan, maka cara guru agama mengajar akan sangat menentukan apakah peserta didik tumbuh menjadi pribadi yang moderat atau sebaliknya.

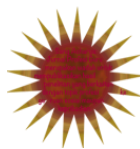
Pemerintah telah menempatkan penguatan moderasi beragama sebagai kebijakan nasional, antara lain melalui Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama. Kementerian Agama merumuskan empat indikator moderasi beragama, yaitu komitmen kebangsaan, toleransi, sikap antikekerasan, dan sikap akomodatif terhadap budaya lokal. Persoalannya, rumusan kebijakan tersebut belum selalu berubah menjadi capaian pembelajaran yang terukur dalam penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru. Moderasi beragama masih lebih sering hadir sebagai wacana dalam kegiatan seminar atau sebagai muatan sisipan, dan belum menjadi bagian dari perangkat pembelajaran yang disusun peserta program serta belum menjadi objek penilaian yang sungguh-sungguh.

Padahal, moderasi beragama bukan gagasan yang asing bagi agama Hindu. Gunada, Ratnaya, dan Arta Wiguna (2023) menunjukkan bahwa nilai susila yang termuat dalam teks susastra Hindu dapat berfungsi sebagai penguat moderasi beragama apabila teks tersebut ditafsirkan dan dihubungkan dengan persoalan nyata. Suterji, Lestari, dan Sepriani (2024) memperlihatkan hal yang sejenis melalui kajiannya atas nilai Tri Kaya Parisudha, yang mencakup kesucian pikiran, perkataan, dan perbuatan, sebagai landasan sikap moderat. Dengan demikian, penguatan moderasi beragama melalui Pendidikan Profesi Guru Agama Hindu bukanlah penambahan gagasan dari luar, melainkan penggalian nilai yang telah lama ada di dalam ajaran itu sendiri.

Kebutuhan akan guru agama Hindu yang moderat juga bertambah mendesak karena perubahan komposisi tempat umat Hindu tinggal. Sebagian besar guru agama Hindu kini bertugas di sekolah negeri yang peserta didiknya beragam, bahkan tidak sedikit yang bertugas di daerah dengan umat Hindu sebagai kelompok kecil. Dalam keadaan demikian, guru agama Hindu berhadapan dengan dua tuntutan sekaligus, yaitu memperkuat identitas keagamaan peserta didiknya yang berjumlah sedikit dan sekaligus menjaga hubungan baik dengan lingkungan sekolah yang mayoritasnya berbeda keyakinan. Kedua tuntutan itu hanya dapat dipenuhi oleh guru yang memiliki kematangan sikap, dan kematangan semacam itu tidak muncul dengan sendirinya melainkan harus disiapkan.

Persoalan lain menyangkut kesenjangan antara penguasaan teori dan kemampuan praktik. Pratomo, Nurhuda, Soipah, dan Noviantie (2024) mencatat bahwa pengembangan profesionalisme guru dari perspektif pedagogik menghadapi tantangan berupa kesenjangan antara teori dan praktik, perubahan paradigma pengajaran, serta pengelolaan kelas yang efektif. Pada guru agama Hindu, kesenjangan tersebut memiliki bentuknya sendiri, yaitu ketika guru menguasai uraian tattwa, susila, dan acara secara mendalam tetapi belum mampu mengubahnya menjadi pengalaman belajar yang bermakna bagi peserta didik pada jenjang usia tertentu.

Kajian mengenai Pendidikan Profesi Guru selama ini lebih banyak menyoroti jalur umum dengan fokus pada peningkatan kompetensi pedagogik dan kepuasan pihak sekolah mitra. Sementara itu kajian mengenai moderasi beragama lebih banyak menyoroti peserta didik sebagai sasaran penanaman nilai, dan belum banyak menempatkan penyiapan gurunya sebagai



objek telaah. Akibatnya, pertanyaan mengenai bagaimana seorang guru agama disiapkan agar mampu menjadi penggerak moderasi beragama belum memperoleh jawaban yang memadai. Kajian ini berupaya mengisi ruang tersebut dengan menempatkan Pendidikan Profesi Guru Agama Hindu sebagai titik temu antara pembentukan kompetensi keguruan dan pembentukan sikap keberagamaan yang moderat.

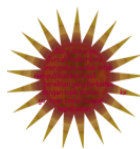
Berdasarkan uraian tersebut, kajian ini difokuskan pada lima permasalahan pokok. Pertama, bagaimana hakikat dan landasan Pendidikan Profesi Guru Agama Hindu. Kedua, bagaimana struktur kompetensi yang perlu dikuasai guru agama Hindu. Ketiga, bagaimana kedudukan moderasi beragama sebagai orientasi program. Keempat, strategi apa yang dapat ditempuh untuk menguatkannya. Kelima, tantangan apa yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Kajian ini diharapkan memberikan sumbangan teoretis bagi pengembangan kurikulum Pendidikan Profesi Guru Agama Hindu, sekaligus sumbangan praktis bagi dosen, instruktur, dan guru pamong dalam merancang pengalaman belajar yang membentuk guru agama yang kompeten sekaligus moderat.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan. Pilihan tersebut didasarkan pada karakteristik permasalahan yang dikaji, yaitu permasalahan konseptual mengenai struktur kompetensi, orientasi program, dan strategi penguatkannya, yang jawabannya terletak pada penafsiran terhadap teks dan sintesis terhadap temuan penelitian terdahulu.

Sumber data dibedakan menjadi tiga. Sumber pertama berupa susastra Hindu yang memuat ajaran tentang kedudukan guru, proses belajar, dan sikap terhadap perbedaan, meliputi Bhagavadgita, Manawa Dharmasastra, Rgveda, Yajurveda, Chandogya Upanisad, dan Sarasamuscaya. Sumber kedua berupa bahan hukum, meliputi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, serta Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama. Sumber ketiga berupa lima belas artikel jurnal nasional terbitan tahun 2021 sampai 2025 yang dipilih dengan kriteria kesesuaian tema dengan pendidikan profesi guru, kompetensi guru, pendidikan agama Hindu, dan moderasi beragama.

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi berupa penelusuran, pembacaan, dan pencatatan terhadap bagian teks yang relevan dengan fokus kajian. Data dianalisis dengan teknik analisis isi yang berlangsung melalui tiga tahap yang saling berkaitan, yaitu reduksi data dengan memilah temuan yang relevan, penyajian data dengan menyusun temuan ke dalam kategori landasan, kompetensi, orientasi, strategi, dan tantangan, serta penarikan simpulan dengan menghubungkan kategori tersebut menjadi proposisi yang menjawab rumusan masalah. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber.



III. PEMBAHASAN

3.1 Hakikat dan Landasan Pendidikan Profesi Guru Agama Hindu

3.1.1 Kedudukan Guru sebagai Jabatan Profesional

Suatu pekerjaan disebut profesi apabila memenuhi sejumlah syarat, yaitu memerlukan keahlian khusus yang diperoleh melalui pendidikan yang panjang, memiliki tubuh pengetahuan yang tersusun, memiliki kode etik, memiliki organisasi profesi, dan memberikan layanan kepada masyarakat berdasarkan tanggung jawab keilmuan. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menempatkan guru dalam kedudukan tersebut dengan menegaskan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, serta kemampuan mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Pendidikan Profesi Guru merupakan wujud pemenuhan syarat keahlian tersebut. Programnya dirancang untuk membentuk kemampuan yang tidak cukup diperoleh melalui pendidikan akademik semata, yaitu kemampuan mengubah penguasaan bidang studi menjadi pengalaman belajar. Mardhatillah dan Surjanti (2023) menegaskan bahwa kekuatan program ini terletak pada keterpaduan antara pendalaman materi, lokakarya penyusunan perangkat pembelajaran, dan praktik pengalaman lapangan, sehingga peserta tidak berhenti pada pengetahuan tentang cara mengajar melainkan sampai pada kemampuan mengajar.

Bagi guru agama Hindu, penyelenggaraan program ini memiliki kekhususan karena berada dalam pembinaan Kementerian Agama dan diselenggarakan oleh perguruan tinggi keagamaan Hindu. Kekhususan tersebut membawa konsekuensi bahwa muatan programnya tidak cukup mencakup kompetensi keguruan umum, melainkan harus pula mencakup penguasaan sumber ajaran, kemampuan menafsirkan teks susastra, serta kemampuan menghadirkan nilai keagamaan dalam pembelajaran secara kontekstual.

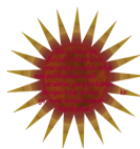
3.1.2 Kedudukan Guru dalam Perspektif Hindu

Dalam pandangan Hindu, guru bukan sekadar pekerjaan melainkan kedudukan yang dihormati. Penghormatan tersebut bersumber dari keyakinan bahwa guru menghantarkan seseorang dari ketidaktahuan menuju pengetahuan, dan pengetahuan itulah yang memungkinkan manusia menempuh jalan kebebasan.

Penyejajaran guru dengan tiga perwujudan ketuhanan tersebut memiliki makna pedagogis yang dalam. Brahma dikaitkan dengan penciptaan, sehingga guru menciptakan kemampuan baru pada diri peserta didik. Wisnu dikaitkan dengan pemeliharaan, sehingga guru memelihara dan menumbuhkan kemampuan tersebut secara berkelanjutan. Mahesvara dikaitkan dengan peleburan, sehingga guru melebur ketidaktahuan, prasangka, dan kebiasaan buruk peserta didik. Ketiga peran itu memberikan gambaran menyeluruh tentang apa yang sesungguhnya dikerjakan seorang guru.

Manawa Dharmasastra bahkan menempatkan guru yang memberikan pengetahuan pada kedudukan yang melampaui orang tua yang melahirkan, karena kelahiran yang diberikan guru bersifat kekal.

*utpadakabrahmadatror gariyan brahmadah pita,
brahmajanna hi viprasya pretya ceha ca sasvatam.*



Terjemahan:

Di antara orang tua yang melahirkan dan guru yang memberikan pengetahuan suci, guru pemberi pengetahuan itulah yang lebih utama, sebab kelahiran melalui pengetahuan bersifat kekal baik di dunia ini maupun sesudahnya.

(Manawa Dharmasastra II.146)

Kedudukan yang tinggi tersebut membawa tuntutan yang setara tingginya. Guru dihormati bukan karena jabatannya melainkan karena pengetahuan dan perilakunya, sehingga penghormatan itu harus terus-menerus dibuktikan. Di sinilah letak pertemuan antara pandangan Hindu dan gagasan keprofesian modern, yaitu bahwa kedudukan seorang guru bergantung pada kemampuannya memberikan layanan keahlian yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kedudukan guru tersebut memperoleh maknanya karena keyakinan Hindu bahwa kelahiran sebagai manusia merupakan kesempatan istimewa untuk memperbaiki diri melalui perbuatan yang baik. Sarasamuscaya merumuskan keyakinan itu pada bagian pembukanya.

*iyam hi yonih prathama yam prapya jagatipate,
atmanam sakyate tratum karmabhiih subhalaksanaih.*

Terjemahan:

Kelahiran sebagai manusia inilah yang utama, wahai penguasa dunia, sebab dengan mencapainya seseorang dapat menyelamatkan dirinya melalui perbuatan yang berciri baik.

(Sarasamuscaya 2)

Sloka tersebut menempatkan pendidikan pada kedudukan yang sangat penting, sebab perbuatan yang baik hanya mungkin dilakukan oleh orang yang mengetahui mana yang baik. Guru karena itu berperan membuka kesempatan yang disebut sloka ini, dan tugas tersebut menuntut kesiapan yang tidak dapat diserahkan pada kebetulan. Di sinilah letak pembenaran bagi keberadaan program penyiapan guru yang terencana dan terukur.

Susastra Hindu juga memberikan gambaran mengenai bagaimana pengetahuan semestinya diperoleh, yang secara langsung bersesuaian dengan rancangan Pendidikan Profesi Guru.

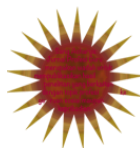
*tad viddhi pranipatena pariprasnena sevaya,
upadeksyanti te jnanam jnaninas tattvadarsinah.*

Terjemahan:

Ketahuilah hal itu dengan cara mendekat dengan rendah hati, dengan mengajukan pertanyaan, dan dengan pengabdian; mereka yang berpengetahuan dan telah melihat kebenaran akan mengajarkan pengetahuan itu kepadamu.

(Bhagavadgita IV.34)

Sloka tersebut menyebutkan tiga jalan memperoleh pengetahuan, yaitu pranipata berupa kerendahan hati, pariprasna berupa keberanian bertanya secara kritis, dan seva berupa



pengabdian atau keterlibatan dalam pekerjaan nyata. Ketiganya secara mengejutkan sejajar dengan tiga tahapan Pendidikan Profesi Guru. Kerendahan hati diperlukan pada tahap pendalaman materi, keberanian bertanya diperlukan pada tahap lokakarya dan diskusi kasus, sedangkan pengabdian diwujudkan pada tahap praktik pengalaman lapangan. Dengan demikian, rancangan program yang berlaku sekarang sesungguhnya memiliki pembenaran dalam ajaran Hindu sendiri.

3.1.3 Struktur Program dan Tahapannya

Pendidikan Profesi Guru pada umumnya diselenggarakan melalui tahapan yang saling berurutan. Tahap pertama berupa pendalaman materi, yaitu penguatan penguasaan bidang studi beserta cara membelajarkannya. Pada guru agama Hindu, tahap ini mencakup pendalaman tattwa, susila, dan acara, penguasaan sumber ajaran, serta penguasaan pedagogi khusus pendidikan agama. Tahap kedua berupa lokakarya, yaitu penyusunan perangkat pembelajaran mulai dari analisis capaian pembelajaran, penyusunan tujuan, pemilihan metode dan media, sampai penyusunan instrumen penilaian.

Tahap ketiga berupa praktik pengalaman lapangan, yaitu penerapan perangkat yang telah disusun di kelas nyata dengan pendampingan guru pamong dan dosen pembimbing. Tahap keempat berupa uji kompetensi, yang mencakup uji pengetahuan dan uji kinerja, sebagai penanda ketercapaian standar keprofesian. Keempat tahapan tersebut dirancang bertingkat, yaitu dari penguasaan pengetahuan menuju perancangan, dilanjutkan ke pelaksanaan, dan diakhiri dengan pengujian.

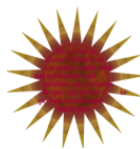
Rancangan bertingkat tersebut memiliki kelebihan karena memastikan bahwa peserta tidak melompat dari pengetahuan langsung ke pengujian tanpa melalui pengalaman. Namun rancangan ini juga menyimpan risiko, yaitu apabila setiap tahap dijalankan sebagai kewajiban yang terpisah. Ketika lokakarya dipandang sekadar menghasilkan dokumen dan praktik lapangan dipandang sekadar memenuhi jumlah pertemuan, keterpaduan yang menjadi kekuatan program justru hilang. Karena itu keberhasilan program sangat bergantung pada kemampuan penyelenggara menjaga benang merah antartahap, dan dalam konteks kajian ini benang merah tersebut adalah orientasi pada pembentukan guru yang kompeten sekaligus moderat.

3.2 Struktur Kompetensi Guru Agama Hindu

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menetapkan empat kompetensi yang wajib dimiliki guru, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Bagi guru agama Hindu, keempatnya perlu dibaca ulang dalam konteks tugas keagamaannya, dan perlu dilengkapi dengan satu kompetensi yang menjadi penciri keprofesiannya.

3.2.1 Kompetensi Pedagogik

Kompetensi pedagogik mencakup kemampuan memahami karakteristik peserta didik, merancang dan melaksanakan pembelajaran, memanfaatkan teknologi, serta menilai hasil belajar. Bagi guru agama Hindu, kompetensi ini menuntut kemampuan menerjemahkan ajaran yang bersifat abstrak menjadi pengalaman belajar yang sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik. Uraian mengenai Atman, misalnya, tidak dapat disampaikan dengan cara yang sama kepada peserta didik sekolah dasar dan sekolah menengah atas.



Pratomo dan kawan-kawan (2024) mencatat bahwa persoalan utama pengembangan profesionalisme guru dari perspektif pedagogik terletak pada kesenjangan antara teori dan praktik. Pada guru agama, kesenjangan itu muncul dalam bentuk dominasi metode ceramah yang menempatkan peserta didik sebagai penerima pasif. Darma Permana (2024) memperlihatkan jalan keluarnya melalui kajian atas strategi guru agama Hindu dalam menumbuhkan sikap moderat peserta didik, yaitu dengan mengelola pembelajaran yang memberi ruang bagi dialog dan pengalaman langsung, bukan sekadar penyampaian materi.

Dalam kerangka Pendidikan Profesi Guru, kompetensi pedagogik dibentuk terutama melalui lokakarya penyusunan perangkat pembelajaran dan melalui praktik mengajar yang disertai umpan balik. Riyana dan kawan-kawan (2024) memperlihatkan bahwa sekolah mitra memandang kehadiran mahasiswa praktik bermanfaat justru ketika mahasiswa membawa cara mengajar yang baru dan bersedia menerima bimbingan dari guru pamong.

3.2.2 Kompetensi Kepribadian

Kompetensi kepribadian mencakup kemantapan, kestabilan, kedewasaan, kearifan, kewibawaan, akhlak mulia, dan keteladanan. Bagi guru agama, kompetensi ini memiliki bobot yang lebih besar dibandingkan bagi guru mata pelajaran lain, sebab yang diajarkan adalah nilai, dan nilai hanya dapat diajarkan secara meyakinkan oleh orang yang menghidupinya. Peserta didik menilai kebenaran ajaran yang disampaikan gurunya melalui perilaku guru itu sendiri.

Bhagavadgita merumuskan mekanisme keteladanan tersebut dengan sangat jelas.

*yad yad acarati sresthas tat tad evetaro janah,
sa yat pramanam kurute lokas tad anuvartate.*

Terjemahan:

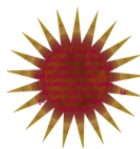
Apa pun yang dilakukan oleh orang yang terkemuka, hal itu pula yang dilakukan oleh orang lain, ukuran apa pun yang ia tetapkan, masyarakat akan mengikutinya.

(Bhagavadgita III.21)

Dalam konteks moderasi beragama, sloka tersebut memiliki konsekuensi yang sangat praktis. Guru agama Hindu yang secara verbal mengajarkan penghormatan terhadap pemeluk agama lain, tetapi dalam percakapan sehari-hari melontarkan lelucon yang merendahkan kelompok lain, sedang mengajarkan dua hal yang bertentangan, dan peserta didik akan mengikuti yang kedua. Karena itu pembentukan kompetensi kepribadian dalam Pendidikan Profesi Guru tidak cukup dilakukan melalui perkuliahan etika profesi, melainkan menuntut pembiasaan, refleksi diri, dan keteladanan dari dosen serta guru pamong.

3.2.3 Kompetensi Sosial

Kompetensi sosial mencakup kemampuan berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat. Bagi guru agama Hindu, kompetensi ini menuntut kemampuan menjalin hubungan lintas iman di lingkungan sekolah yang majemuk, kemampuan bekerja sama dengan guru agama lain dalam kegiatan bersama, serta kemampuan berkomunikasi dengan orang tua dan tokoh umat.



Gunawan dan Arta (2024) memperlihatkan bahwa penanaman nilai filosofi pendidikan multikultural bagi peserta didik Hindu di sekolah yang majemuk sangat bergantung pada kemampuan guru agama membangun hubungan yang setara dengan lingkungan sekitarnya. Guru agama Hindu yang mengisolasi diri dan hanya berinteraksi dengan peserta didik seagama akan kesulitan menanamkan sikap moderat, sebab peserta didik tidak menyaksikan contoh nyata hubungan lintas iman yang sehat.

Weda memberikan rumusan yang sangat tepat untuk menggambarkan sikap sosial yang diharapkan, yaitu sikap memandang semua makhluk sebagai sahabat.

*mitrasya ma caksusa sarvani bhutani samiksantam,
mitrasyaham caksusa sarvani bhutani samikse,
mitrasya caksusa samiksamahe.*

Terjemahan:

Semoga semua makhluk memandangu dengan pandangan sahabat; semoga aku memandang semua makhluk dengan pandangan sahabat; semoga kita semua saling memandang dengan pandangan sahabat.

(Yajurveda XXXVI.18)

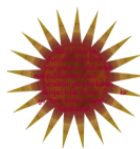
Mantra tersebut melampaui tuntutan sekadar tidak mengganggu. Yang diminta adalah relasi persahabatan yang bersifat timbal balik. Bagi guru agama Hindu di sekolah negeri yang majemuk, sikap ini merupakan modal utama, sebab hubungan baik dengan sesama guru agama lain justru memperkuat kedudukan pendidikan agama Hindu di sekolah tersebut.

3.2.4 Kompetensi Profesional

Kompetensi profesional mencakup penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam beserta struktur keilmuannya. Bagi guru agama Hindu, penguasaan itu meliputi kerangka dasar ajaran yang terdiri atas tattwa, susila, dan acara, penguasaan sumber ajaran mulai dari Sruti dan Smrti sampai pada susastra Nusantara, serta kemampuan menafsirkan teks secara bertanggung jawab.

Kemampuan menafsirkan merupakan bagian yang sering terabaikan. Guru yang hanya menghafal terjemahan sloka tanpa memahami konteksnya berisiko menyampaikan makna yang menyimpang, dan dalam kasus tertentu berisiko menggunakan teks keagamaan untuk membenarkan sikap yang justru bertentangan dengan semangat ajarannya. Gunada, Ratnaya, dan Arta Wiguna (2023) menegaskan bahwa teks susastra Hindu baru berfungsi sebagai penguat moderasi beragama apabila ditafsirkan dan dihubungkan dengan persoalan nyata, bukan sekadar dibaca dan dihafalkan.

Pada masa kini kompetensi profesional juga mencakup kecakapan digital. Akib, Arriah, dan Dharma (2022) menemukan bahwa kecakapan literasi digital guru berpengaruh terhadap penguatan pendidikan karakter peserta didik, sehingga guru yang tidak menguasai media digital akan kesulitan mendampingi peserta didik yang sebagian besar waktunya berada di ruang digital. Sudarsana dan Mastini (2025) memperkuat hal tersebut dengan menunjukkan bahwa penanaman nilai karakter melalui pendidikan agama Hindu pada era digital menuntut guru yang mampu memanfaatkan media tanpa kehilangan kedalaman nilainya.



3.3 Moderasi Beragama sebagai Orientasi Program

3.3.1 Pengertian dan Indikator Moderasi Beragama

Moderasi beragama merupakan cara pandang, sikap, dan praktik beragama yang menempatkan diri di tengah, yaitu tidak berlebihan dalam mengklaim kebenaran sendiri dan tidak pula longgar sehingga kehilangan pijakan pada ajaran agamanya. Moderasi bukan pengurangan kadar keberagamaan, melainkan cara beragama yang menjaga keseimbangan antara ketaatan pada ajaran sendiri dan penghormatan terhadap pemeluk ajaran lain. Kementerian Agama merumuskan empat indikatornya, yaitu komitmen kebangsaan, toleransi, sikap antikekerasan, dan sikap akomodatif terhadap budaya lokal.

Keempat indikator tersebut dapat diterjemahkan ke dalam perilaku guru agama Hindu secara konkret. Komitmen kebangsaan tampak pada kesediaan menempatkan ajaran agama sebagai penguat kehidupan berbangsa, bukan sebagai pesaingnya. Toleransi tampak pada penghormatan terhadap peserta didik dan rekan sejawat yang berbeda keyakinan. Sikap antikekerasan tampak pada penolakan terhadap segala bentuk pemaksaan dalam beragama, termasuk pemaksaan yang bersifat halus melalui tekanan sosial. Sikap akomodatif terhadap budaya lokal tampak pada kemampuan menghargai keragaman dresta antardesa tanpa menyalahkan praktik yang berbeda.

Sukodoyo, Widiyono, Medhacitto, dan Setyaningsih (2024) memperlihatkan bahwa internalisasi nilai moderasi beragama melalui pendidikan agama berlangsung efektif apabila nilai tersebut digali dari sumber ajaran agama peserta didik sendiri, sehingga moderasi tidak dirasakan sebagai gagasan asing yang datang dari luar agama. Temuan ini memberikan arah yang jelas bagi penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru Agama Hindu, yaitu bahwa penguatan moderasi harus ditempuh melalui pendalaman ajaran Hindu itu sendiri, bukan melalui penambahan materi baru yang terlepas dari bidang studi.

3.3.2 Akar Moderasi Beragama dalam Ajaran Hindu

Ajaran Hindu menyediakan landasan yang kuat bagi sikap moderat. Landasan yang paling mendasar adalah pengakuan bahwa kebenaran itu satu meskipun disebut dengan banyak nama.

ekam sad vipra bahudha vadanti.

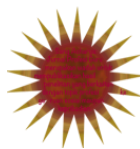
Terjemahan:

Kebenaran itu hanya satu, para bijaksana menyebutnya dengan banyak nama.

(Rgveda I.164.46)

Mantra tersebut tidak meminta seseorang menganggap semua agama sama dan tidak pula meminta pengaburan keyakinan sendiri. Yang diajarkan adalah kesediaan menerima bahwa orang lain menempuh jalan yang berbeda menuju tujuan yang sama. Bagi guru agama Hindu, mantra ini menyediakan pijakan teologis untuk menjelaskan kepada peserta didik mengapa perbedaan cara beribadah tidak perlu dipandang sebagai kekeliruan.

Landasan berikutnya adalah ajaran Tat Twam Asi yang bersumber dari Chandogya Upanisad, yang menegaskan kesatuan hakikat seluruh makhluk. Suastini dan Suarjaya (2021)



menjelaskan bahwa ajaran ini merupakan dasar tata susila Hindu yang berpijak pada pengakuan atas kesamaan martabat manusia, dan bahwa kehidupan yang damai tidak mungkin diwujudkan tanpa toleransi berupa sikap saling menghormati, menghargai, memahami, dan menerima perbedaan. Melalui ajaran ini, toleransi tidak diajarkan sebagai aturan sosial melainkan sebagai konsekuensi kesadaran spiritual.

Landasan ketiga bersifat operasional, yaitu Tri Kaya Parisudha yang menuntut kesucian pikiran, perkataan, dan perbuatan. Suterji, Lestari, dan Sepriani (2024) menunjukkan bahwa ketiga ranah tersebut memiliki relevansi langsung dengan penguatan moderasi beragama karena mencakup keseluruhan wujud interaksi manusia dengan sesamanya. Bagi guru, manacika berarti tidak berprasangka terhadap pemeluk agama lain, wacika berarti tidak melontarkan perkataan yang merendahkan, dan kayika berarti tidak melakukan perbuatan yang menghalangi orang lain menjalankan keyakinannya.

Landasan keempat menyangkut watak pribadi yang diharapkan tumbuh pada diri seorang guru. Bhagavadgita menggambarkan profil pribadi yang telah mencapai keadaan tersebut.

*advesta sarva-bhutanam maitrah karuna eva ca,
nirmamo nirahankarah sama-duhkha-sukhah ksami.*

Terjemahan:

Ia yang tidak membenci makhluk mana pun, bersahabat dan penuh welas asih, bebas dari rasa memiliki dan keakuan, sama dalam suka maupun duka, serta pemaaf.

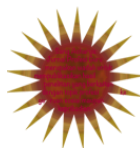
(Bhagavadgita XII.13)

Sifat-sifat yang disebutkan dalam sloka tersebut, yaitu tidak membenci, bersahabat, welas asih, dan pemaaf, sesungguhnya merupakan rumusan profil guru yang moderat. Yang menarik, sloka ini tidak berbicara tentang sikap terhadap sesama pemeluk agama yang sama, melainkan tentang sikap terhadap seluruh makhluk tanpa pembatasan. Dengan demikian moderasi dalam perspektif ini bukan sikap yang dipilih karena tuntutan hidup bernegara, melainkan watak yang tumbuh dari kematangan rohani.

3.3.3 Integrasi Moderasi ke dalam Kurikulum Program

Dengan landasan tersebut, moderasi beragama semestinya tidak diperlakukan sebagai mata kuliah tambahan melainkan sebagai orientasi yang meresap ke seluruh tahapan program. Pada tahap pendalaman materi, moderasi hadir melalui penafsiran teks yang menekankan semangat persaudaraan. Pada tahap lokakarya, moderasi hadir melalui perangkat pembelajaran yang secara sengaja memuat indikator sikap moderat. Pada tahap praktik lapangan, moderasi hadir melalui pengalaman mengajar di sekolah yang majemuk. Pada tahap penilaian, moderasi hadir melalui instrumen yang mengukur sikap, bukan hanya pengetahuan.

Zulkarnain dan Gule (2025) menegaskan bahwa penanaman pandangan yang mengakui kebenaran di balik keragaman agama harus berlangsung secara berkelanjutan melalui pendidikan. Kata berkelanjutan di sini penting, sebab sikap moderat tidak terbentuk melalui satu kegiatan seminar, melainkan melalui pengalaman yang berulang dan disertai refleksi.



3.3.4 Guru sebagai Penggerak Moderasi di Sekolah

Kebijakan penguatan moderasi beragama hanya akan bekerja apabila ada pelaksana yang meyakinkannya. Di sekolah, pelaksana itu terutama adalah guru agama, sebab dialah yang paling sering berbicara mengenai keyakinan di hadapan peserta didik dan yang paling dipercaya ketika peserta didik memiliki pertanyaan mengenai perbedaan agama. Pitaloka dan Purwanta (2021) menegaskan bahwa peran guru dalam menanamkan nilai toleransi sangat menentukan, terutama melalui pembiasaan dan keteladanan yang memungkinkan peserta didik merasakan makna toleransi dan bukan sekadar mengetahui definisinya.

Peran tersebut berlangsung melalui beberapa jalur. Jalur pertama adalah penjelasan langsung ketika materi ajar menyinggung hubungan antarumat beragama. Jalur kedua adalah tanggapan spontan ketika muncul peristiwa di kelas, misalnya ketika seorang peserta didik mengejek kebiasaan ibadah temannya. Tanggapan pada momen semacam ini jauh lebih berbekas daripada penjelasan terencana, sebab peserta didik menyaksikan bagaimana gurunya bersikap ketika berhadapan dengan persoalan nyata. Jalur ketiga adalah keterlibatan guru dalam kegiatan bersama lintas agama di sekolah, yang memperlihatkan bahwa kerja sama lintas keyakinan merupakan hal yang wajar.

Konsekuensinya bagi Pendidikan Profesi Guru adalah bahwa peserta program perlu dilatih menghadapi ketiga jalur tersebut. Latihan untuk jalur pertama dapat ditempuh melalui penyusunan bahan ajar, latihan untuk jalur kedua melalui simulasi dan bermain peran atas situasi kelas yang sulit, sedangkan latihan untuk jalur ketiga melalui keterlibatan nyata dalam kegiatan sekolah selama praktik lapangan. Tanpa latihan pada jalur kedua, guru berisiko membeku atau memilih diam ketika peristiwa intoleransi terjadi di depan matanya, dan sikap diam itu sendiri akan ditafsirkan peserta didik sebagai membenaran.

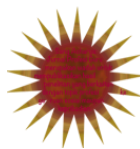
3.4 Strategi Penguatan melalui Pendidikan Profesi Guru

3.4.1 Pendalaman Materi Berbasis Kasus

Pendalaman materi sebaiknya tidak berhenti pada penguraian isi ajaran, melainkan dilanjutkan dengan pembahasan kasus nyata yang dihadapi guru agama di lapangan. Kasus dapat berupa pertanyaan peserta didik mengenai perbedaan keyakinan temannya, permintaan sekolah agar guru agama terlibat dalam kegiatan lintas agama, atau perbedaan pandangan mengenai pelaksanaan upacara antardesa. Melalui pembahasan kasus, peserta program dilatih menghubungkan teks dengan kenyataan, dan inilah keterampilan yang paling dibutuhkan ketika mereka mengajar.

Pembahasan kasus juga melatih kemampuan menafsirkan secara bertanggung jawab. Peserta dibiasakan menelusuri konteks sloka sebelum menariknya sebagai dasar sikap, sehingga terhindar dari kebiasaan mengutip potongan teks secara lepas. Kebiasaan ini sangat menentukan, sebab pengutipan yang lepas dari konteks merupakan salah satu pintu masuk sikap keberagamaan yang tidak moderat.

Agar pembahasan kasus berjalan bermakna, diperlukan cara kerja yang tertib. Peserta dapat dibiasakan menempuh empat langkah, yaitu menguraikan duduk persoalan secara lengkap tanpa tergesa menilai, mencari ketentuan atau ajaran yang relevan beserta konteksnya, menimbang beberapa pilihan tindakan beserta akibatnya, dan akhirnya memilih tindakan disertai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Langkah-langkah tersebut melatih kehati-



hatian yang justru menjadi ciri sikap moderat, yaitu kesediaan menunda penilaian sampai persoalan dipahami secara utuh.

3.4.2 Lokakarya Perangkat Pembelajaran Bermuatan Moderasi

Lokakarya merupakan tahap yang paling menentukan karena menghasilkan produk yang akan digunakan peserta ketika mengajar. Pada tahap ini, indikator moderasi beragama perlu dituntut hadir secara nyata dalam modul ajar yang disusun, misalnya melalui rumusan tujuan pembelajaran yang memuat sikap menghargai perbedaan, melalui pemilihan cerita dan contoh yang tidak merendahkan kelompok lain serta melalui rancangan kegiatan yang menuntut peserta didik bekerja sama lintas latar belakang.

Darma Permana (2024) memperlihatkan bahwa strategi guru agama Hindu dalam menumbuhkan sikap moderat berlangsung melalui pengelolaan bahan ajar dan pengalaman belajar yang memperkenalkan keragaman sebagai hal yang wajar. Hal ini menunjukkan bahwa perangkat pembelajaran bukan sekadar kelengkapan administratif, melainkan alat utama penanaman sikap.

3.4.3 Praktik Pengalaman Lapangan di Sekolah Majemuk

Penempatan praktik sebaiknya tidak hanya di sekolah yang peserta didiknya seluruhnya beragama Hindu. Pengalaman mengajar di sekolah negeri dengan komposisi peserta didik yang beragam memberikan pembelajaran yang tidak dapat digantikan oleh perkuliahan mana pun, yaitu pengalaman berhadapan langsung dengan perbedaan dan belajar mengelolanya. Gunawan dan Arta (2024) memperlihatkan bahwa lingkungan sekolah yang majemuk justru menjadi ruang paling subur bagi penanaman nilai multikultural apabila guru mampu memanfaatkannya.

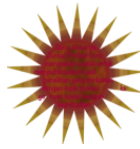
Riyana dkk (2024) mencatat bahwa keberhasilan praktik lapangan sangat ditentukan oleh kualitas hubungan antara mahasiswa praktik, guru pamong, dan pihak sekolah. Karena itu pemilihan guru pamong bagi peserta program guru agama Hindu perlu mempertimbangkan bukan hanya senioritas, melainkan juga keteladanan sikap moderat yang bersangkutan, sebab guru pamonglah yang menjadi model terdekat bagi peserta.

3.4.4 Refleksi Terbimbing dan Penelitian Tindakan

Setiap pengalaman mengajar perlu diikuti refleksi yang terbimbing, yaitu kegiatan menelaah kembali apa yang terjadi, mengapa terjadi, dan apa yang akan dilakukan berbeda pada kesempatan berikutnya. Refleksi inilah yang mengubah pengalaman menjadi pembelajaran. Tanpa refleksi, praktik mengajar berisiko berhenti sebagai pengulangan kebiasaan tanpa perbaikan. Refleksi yang terstruktur dapat dikembangkan menjadi penelitian tindakan kelas, yaitu upaya sistematis memperbaiki pembelajaran melalui siklus perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Maulana dkk (2023) menegaskan bahwa Pendidikan Profesi Guru bertujuan membentuk guru yang profesional, dan salah satu ciri keprofesionalitas adalah kemampuan memperbaiki praktiknya sendiri berdasarkan bukti. Kemampuan ini juga menjadi bekal bagi pengembangan keprofesionalitas berkelanjutan sesudah program berakhir.

3.5 Tantangan Penyelenggaraan

Tantangan pertama menyangkut ketersediaan dosen dan instruktur yang menguasai dua bidang sekaligus, yaitu ilmu keguruan dan ilmu keagamaan Hindu. Tidak jarang penguasaan



yang mendalam pada salah satu bidang tidak diimbangi penguasaan pada bidang lainnya, sehingga pembelajaran berjalan terpisah antara aspek pedagogis dan aspek keagamaan. Penyelesaiannya menuntut penyiapan tim pengajar yang bekerja secara kolaboratif serta peningkatan kapasitas dosen melalui pelatihan lintas bidang.

Tantangan kedua menyangkut keterbatasan sekolah mitra. Sekolah yang memiliki guru agama Hindu dengan pengalaman memadai untuk menjadi guru pamong tidak selalu tersedia dalam jumlah yang cukup, terutama di daerah dengan jumlah umat Hindu yang sedikit. Keadaan ini menyebabkan sebagian peserta memperoleh pendampingan yang kurang optimal. Penyelesaiannya dapat ditempuh melalui pemanfaatan jaringan lintas daerah, pendampingan jarak jauh, serta pelibatan lembaga pendidikan keagamaan Hindu sebagai mitra tambahan.

Tantangan ketiga menyangkut beban administratif. Tuntutan penyelesaian berbagai dokumen dalam waktu yang terbatas berisiko menggeser perhatian peserta dari penguasaan kompetensi menuju pemenuhan kelengkapan berkas. Pratomo dan kawan-kawan (2024) mengingatkan bahwa pengembangan profesionalisme guru menuntut proses yang holistik dan berkelanjutan, dan proses semacam itu tidak dapat berlangsung apabila waktu peserta habis untuk urusan administratif.

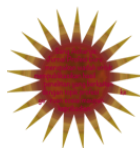
Tantangan keempat menyangkut kesinambungan sesudah program berakhir. Sertifikat pendidik menandai selesainya suatu tahapan, tetapi tidak menjamin berlanjutnya pengembangan diri. Akib, Arriah, dan Dharma (2022) memperlihatkan bahwa kecakapan guru, termasuk kecakapan digital, berpengaruh langsung terhadap mutu pembinaan peserta didik, sehingga kecakapan tersebut perlu terus diperbarui. Penyelesaiannya menuntut penguatan kelompok kerja guru agama Hindu sebagai wadah pengembangan keprofesian berkelanjutan.

Tantangan kelima menyangkut konsistensi lingkungan. Guru yang telah dibekali sikap moderat dapat kehilangan pijakannya apabila lingkungan tempatnya bertugas justru menguatkan sikap yang sebaliknya. Karena itu penguatan moderasi beragama tidak cukup dilakukan pada tataran individu guru, melainkan perlu menjangkau kebijakan sekolah, penyiapan kepala sekolah, serta pelibatan tokoh umat di sekitar sekolah.

Tantangan keenam menyangkut keragaman latar belakang peserta program. Peserta jalur dalam jabatan umumnya telah memiliki pengalaman mengajar bertahun-tahun namun sebagian di antaranya telah terbiasa dengan cara mengajar tertentu yang sulit diubah, sedangkan peserta jalur prajabatan memiliki keterbukaan terhadap hal baru namun belum memiliki pengalaman mengelola kelas. Perlakuan yang seragam terhadap keduanya berisiko tidak efektif bagi keduanya. Penyelesaiannya menuntut penyesuaian pendekatan, yaitu penekanan pada refleksi dan pembaruan praktik bagi peserta dalam jabatan, serta penekanan pada penguatan pengalaman lapangan bagi peserta prajabatan.

3.6 Implikasi bagi Penyelenggara dan Pemangku Kepentingan

Uraian pada bagian sebelumnya membawa sejumlah implikasi. Implikasi pertama ditujukan kepada perguruan tinggi keagamaan Hindu sebagai penyelenggara. Rumusan capaian pembelajaran program perlu memuat sikap moderat secara eksplisit, bukan sekadar tersirat dalam capaian sikap secara umum. Rumusan yang eksplisit memungkinkan penyusunan instrumen penilaian yang jelas, dan penilaian yang jelas akan mendorong dosen serta instruktur



merancang pengalaman belajar yang sesuai. Selain itu, penyelenggara perlu menyiapkan bahan kajian kasus yang bersumber dari persoalan nyata di lapangan, sebab bahan semacam ini tidak tersedia dalam buku teks dan harus dikumpulkan sendiri dari pengalaman guru.

Implikasi kedua ditujukan kepada dosen dan guru pamong. Keduanya merupakan model terdekat bagi peserta program, sehingga sikap keduanya dalam percakapan sehari-hari memiliki daya ajar yang melebihi materi yang disampaikan secara resmi. Pemilihan guru pamong karena itu perlu mempertimbangkan keteladanan sikap, dan pembekalan bagi guru pamong perlu mencakup pemahaman mengenai apa yang dimaksud dengan moderasi beragama agar terdapat kesamaan arah antara kampus dan sekolah.

Implikasi ketiga ditujukan kepada sekolah dan pemangku kebijakan pendidikan keagamaan. Guru yang moderat memerlukan ruang kerja yang mendukung, yaitu sekolah yang memberikan kesempatan bagi kegiatan lintas agama, kepala sekolah yang memahami pentingnya keseimbangan, serta kebijakan yang tidak menempatkan pendidikan agama sebagai wilayah yang tertutup dari mata pelajaran lain. Tanpa dukungan tersebut, hasil pembentukan pada masa program berisiko luruh ketika guru kembali ke lingkungan kerjanya.

Implikasi keempat ditujukan kepada guru agama Hindu itu sendiri. Sertifikat pendidik menandai terpenuhinya standar minimal, bukan berakhirnya proses belajar. Kemampuan menafsirkan teks, kecakapan digital, dan kepekaan sosial merupakan kemampuan yang menuntut pembaruan terus-menerus seiring perubahan peserta didik dan lingkungannya. Kesediaan memperbarui diri inilah yang pada akhirnya membedakan guru yang berstatus profesional dari guru yang benar-benar bekerja secara profesional.

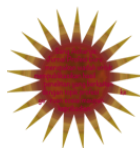
IV. SIMPULAN

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, dapat dirumuskan lima simpulan pokok. Pertama, Pendidikan Profesi Guru Agama Hindu berkedudukan sebagai jalur resmi pembentukan keprofesian guru sebagaimana dituntut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dengan kekhususan berupa muatan keagamaan yang tidak dimiliki program sejenis pada bidang studi umum.

Kedua, struktur kompetensi guru agama Hindu meliputi empat kompetensi baku, yaitu pedagogik, kepribadian, sosial, dan professional. Keempatnya bersifat saling menopang sehingga pembentukannya perlu dirancang secara terpadu, bukan terpisah dalam mata kuliah yang berdiri sendiri.

Ketiga, moderasi beragama memiliki akar yang kuat dalam ajaran Hindu, yaitu pada pengakuan atas kesatuan kebenaran dalam Rgveda I.164.46, pada kesadaran kesetaraan martabat melalui ajaran Tat Twam Asi, pada relasi persahabatan universal dalam Yajurveda XXXVI.18, serta pada pengendalian pikiran, perkataan, dan perbuatan melalui Tri Kaya Parisudha. Dengan demikian penguatan moderasi melalui Pendidikan Profesi Guru merupakan penggalan nilai dari dalam ajaran, bukan penambahan gagasan dari luar.

Keempat, penguatan tersebut dapat ditempuh melalui lima strategi, yaitu pendalaman materi berbasis kasus, lokakarya penyusunan perangkat pembelajaran yang memuat indikator moderasi, praktik pengalaman lapangan di sekolah majemuk dengan guru pamong yang teladan, refleksi terbimbing yang dapat dikembangkan menjadi penelitian tindakan kelas, serta

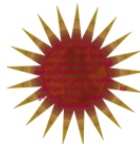


penilaian sikap yang terencana dengan teknik telaah dokumen, observasi, penilaian kinerja, dan jurnal refleksi.

Kelima, tantangan yang dihadapi meliputi keterbatasan dosen dan instruktur yang menguasai dua bidang sekaligus, keterbatasan sekolah mitra dan guru pamong, beban administratif yang menggeser perhatian dari penguasaan kompetensi, lemahnya kesinambungan pengembangan diri sesudah program berakhir, serta ketidakkonsistenan lingkungan tempat guru bertugas. Berdasarkan hal tersebut, disarankan agar penyelenggara program merumuskan capaian pembelajaran moderasi beragama secara eksplisit beserta instrumen penilaiannya, memperluas jaringan sekolah mitra yang majemuk, menyederhanakan beban administratif peserta, serta memperkuat kelompok kerja guru agama Hindu sebagai wadah pengembangan keprofesian berkelanjutan. Penelitian selanjutnya disarankan menguji secara empiris pengaruh model penguatan ini terhadap sikap moderat peserta program melalui rancangan penelitian lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akib, T., Arriah, F., & Dharma, S. (2022). Pengaruh Kecakapan Literasi Digital Guru terhadap Penguatan Pendidikan Karakter Siswa Sekolah Dasar. *Jurnal Administrasi dan Manajemen Pendidikan*, 5(1), 17-24. <https://doi.org/10.17977/um027v5i12022p17>
- Darma Permana, I. D. G. (2024). Strategi Guru Agama Hindu dalam Menumbuhkembangkan Sikap Moderat Siswa di SD Saraswati 6 Denpasar. *Jurnal Penelitian Agama Hindu*, 8(2), 254-273. <https://doi.org/10.37329/jpah.v8i2.2978>
- Gunada, I. W. A., Ratnaya, I. G., & Arta Wiguna, I. B. A. (2023). Internalisasi Nilai Susila dan Pendidikan Karakter dalam Slokantara untuk Penguatan Moderasi Beragama. *Jurnal Penelitian Agama Hindu*, 7(1), 46-64.
- Gunawan, I. G. D., & Arta, I. G. A. J. (2024). Implikasi Penanaman Nilai-Nilai Filosofi Pendidikan Multikultural bagi Siswa Hindu SMPN 2 Basarang Kabupaten Kapuas. *Jurnal Penelitian Agama Hindu*, 8(4), 462-475.
- Kajeng, I. N., dkk. (2010). *Sarasamuccaya*. Surabaya: Paramita.
- Mardhatillah, O., & Surjanti, J. (2023). Peningkatan Kompetensi Pedagogik dan Profesionalitas Guru di Indonesia melalui Pendidikan Profesi Guru (PPG). *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha*, 15(1), 102-111. <https://doi.org/10.23887/jjpe.v15i1.65200>
- Maulana, I., Rahma, N. A., Mahfirah, N. F., Alfarizi, W., & Darlis, A. (2023). Meningkatkan Profesional Guru dengan Program Pendidikan Profesi Guru (PPG). *Journal on Education*, 5(2), 2158-2167. <https://doi.org/10.31004/joe.v5i2.867>
- Pitaloka, D. L., & Purwanta, E. (2021). Peran Guru dalam Menanamkan Nilai Toleransi pada Anak Usia Dini di Indonesia. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 5(2), 1696-1705. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v5i2.972>
- Pratomo, I. C., Nurhuda, T., Soipah, S., & Noviantie, A. (2024). Pengembangan Profesionalisme Guru dari Perspektif Pedagogik. *Jurnal Basicedu*, 8(3), 2008-2014. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v8i3.7541>
- Pudja, G. (2013). *Bhagawad Gita (Pancama Weda)*. Surabaya: Paramita.
- Pudja, G., & Sudharta, T. R. (2004). *Manawa Dharmasastra (Manu Dharmasastra) atau Weda Smrti: Compendium Hukum Hindu*. Surabaya: Paramita.



- Radhakrishnan, S. (1953). *The Principal Upanisads*. London: George Allen & Unwin.
- Riyana, M., Hiskya, H. J., Suradji, F. R., & Hanifah, S. (2024). Analisis Kepuasan Sekolah sebagai Pihak Penerima Mahasiswa PPL PPG Prajabatan dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Pendidikan. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 6(1), 385-392. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v6i1.6058>
- Suastini, N. N., & Suarjaya, I. K. B. R. (2021). Pemahaman Ajaran Tat Twam Asi sebagai Pedoman dalam Upaya Peningkatan Mawas Diri di Era Pandemi Covid-19. *Jurnal Penjaminan Mutu*, 7(2), 195-206. <https://doi.org/10.25078/jpm.v7i2.2546>
- Subawa, I. B. G. (2024). Agama Hindu dan Budaya Bali: Warisan Luhur dalam Kehidupan Modern. *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama*, 7(4), 104-113. <https://doi.org/10.37329/kamaya.v7i4.3805>
- Sudarsana, I. K., & Mastini, G. N. (2025). The Role of Hindu Religious Education in Instilling Character Values in the Young Generation in the Digital Era. *Jurnal Penelitian Agama Hindu*, 9(2), 216-226. <https://doi.org/10.37329/jpah.v9i2.4614>
- Sukodoyo, S., Widiyono, W., Medhacitto, T. S., & Setyaningsih, S. (2024). Internalisasi Nilai Moderasi Beragama melalui Pendidikan Agama Buddha di Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Semarang. *Jurnal Penelitian Agama Hindu*, 8(2), 239-253. <https://doi.org/10.37329/jpah.v8i2.2966>
- Suterji, N. K., Lestari, N. P. P. U., & Sepriani, N. K. (2024). Implementasi Nilai Tri Kaya Parisudha dalam Moderasi Beragama: Perspektif Bhagawad Gita dan Sarasamuscaya. *Jurnal Penelitian Agama Hindu*, 8(4), 499-516.
- Titib, I. M. (1996). *Veda Sabda Suci: Pedoman Praktis Kehidupan*. Surabaya: Paramita.
- Zulkarnain, Z., & Gule, Y. (2025). Perennialisme dan Moderasi Beragama sebagai Pilar Strategis Kerukunan di Tengah Intoleransi Beragama di Indonesia. *Jurnal Penelitian Agama Hindu*, 9(3), 349-362. <https://doi.org/10.37329/jpah.v9i3.4517>